



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 16 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,53	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	2,35	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,45	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	53,61 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPKPAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,89	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian, Pengembang SDM
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita	1.341.267	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan/Kelurahan/ Desa, Sekretariat Daerah
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini Rasio	0,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Dinas Sosial,,Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DinasPerhubungan, Kecamatan.
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,37	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	74,40 (BB)	Setda, Inspektorat dan Baperinda dan seluruh SKPD
		Opini BPK	WTP	BPKPAD, Inspektorat
		Nilai EKPPD	3,5930	Setda dan seluruh SKPD
		Indeks Pelayanan Publik	4.51 (A)	Setda, dan UPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Setda, dan UPP
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	Indeks Desa Membangun	0,6795	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BPBD

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Jalan	159.543.045.600
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.305.291.700
3.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	68.829.900
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.153.412.200
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	52.003.120.250
6.	Penataan Bangunan Gedung	81.277.796.000
7.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.031.834.652
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.961.960.000
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.503.402.400
10.	Kawasan Permukiman	977.848.500
11.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	86.649.441.480
12.	Pengelolaan Persampahan	8.042.271.000
13.	Perencanaan Lingkungan Hidup	494.743.750
14.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	857.102.550
15.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.999.751.000
16.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	46.560.000
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	91.556.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
18.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.564.112.334
19.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	298.656.600
20.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	576.944.200
21.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.316.029.350
22.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.148.967.250
23.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.051.348.300
24.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12.004.119.850
25.	Penyuluhan Pertanian	4.282.802.500
26.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.176.157.128
27.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.694.375.200
28.	Penanganan Kerawanan Pangan	292.550.500
29.	Pengawasan Keamanan Pangan	78.747.200
30.	Pengembangan UMKM	407.430.000
31.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	46.330.000
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	553.510.000
33.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	939.336.100
34.	Pengendalian Izin Usaha Industri	75.530.600
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.026.000.400
36.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.134.445.200
37.	Pengembangan Ekspor	1.673.984.500
38.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50.600.000
39.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	372.711.400
40.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	116.750.000
41.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.668.212.300
42.	Pemasaran Pariwisata	1.286.234.500
43.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	611.324.900
44.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	107.192.000
45.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	165.448.000
46.	Pelayanan Penanaman Modal	369.722.000
47.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	137.895.000
48.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.837.654.328
49.	Penempatan Tenaga Kerja	458.649.200
50.	Pengelolaan Pendidikan	151.454.591.389
51.	Pengembangan Kurikulum	425.214.000
52.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.701.424.400
53.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	208.720.000
54.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.105.779.648
55.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.746.310.300
56.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	261.972.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
57.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	495.527.400
58.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.501.297.300
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	771.179.002.690
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	3.548.247.000
61.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.880.208.600
62.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.378.168.400
63.	Pengelolaan Keuangan Daerah	5.817.664.820
64.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.357.365.700
65.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.122.367.000
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	113.277.199.300
67.	Pemberdayaan Sosial	5.339.082.700
68.	Rehabilitasi Sosial	3.003.953.100
69.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.947.551.900
70.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.239.288.000
71.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	222.020.600
72.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.011.501.100
73.	Penanggulangan Bencana	4.458.399.210
74.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.117.227.700
75.	Pembinaan Sejarah	1.033.733.900
76.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.490.715.400
77.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.940.029.600
78.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.543.924.000
	Jumlah	

Paringin, 16 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom